

## Surat Rekomendasi dari PAN "Hilang", Berkas Persyaratan Rasiyo-Dhimam Belum Lengkap

15 Agustus 2015 - Berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid untuk mengikuti Pilkada Kota Surabaya pada Desember 2015 belum lengkap. Partai Amanat Nasional masih harus menyerahkan surat rekomendasi asli untuk Dhimam Abror kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno, Jumat (14/8), menyatakan sudah menandatangani surat rekomendasi untuk Dhimam Abror pada 10 Agustus lalu. Dia juga menegaskan, surat itu sudah diambil oleh salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur.

"Saya sudah menandatangani surat dan fisik (surat rekomendasi) saya tahu sudah dibawa. Apakah dibawanya pakai mobil, pakai kapal, dan kapan itu saya tidak tahu detailnya. Tapi, sudah dibawa itu," kata Eddy.

Namun, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PAN Jatim Firda S Badri menuturkan, surat itu masih di kantor DPP PAN di Jakarta. "Kami akan segera mengambil dan menyerahkannya ke KPU Surabaya pada masa perbaikan dokumen," tutur Firda.

Saat mendaftar ke KPU Surabaya pada 11 Agustus lalu, pasangan Rasiyo-Dhimam yang diusung Partai Demokrat dan PAN hanya menunjukkan surat rekomendasi dari PAN dalam bentuk surat elektronik. Surat itu dilampirkan dalam bentuk scan foto. Ini karena pada hari yang sama, sebagian besar pengurus PAN sedang mengikuti musyawarah wilayah di Kediri, Jatim, hingga surat rekomendasi tak dapat segera dibawa ke Surabaya.

Munculnya pasangan Rasiyo-Dhimam yang mendaftar pada perpanjangan pendaftaran tahap dua, 9-11 Agustus lalu, membuat ada dua pasangan yang bertarung di Pilkada Surabaya. Pasangan lain adalah Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Hal ini membuat pilkada di kota itu tidak diundur pada 2017.

Saat perpanjangan pendaftaran tahap I, 1-3 Agustus lalu, sebenarnya ada satu pasangan yang siap mendaftar, yaitu Dhimam Abror Djuraid-Haries Purwoko. Namun, saat pendaftaran Haries tiba-tiba menghilang hingga pasangan yang menurut rencana diusung Demokrat dan PAN itu gagal mendaftarkan diri.

"Harus dikejar dokumen aslinya. Mbingungkan juga diminta kok tidak ada. Ini ada apa?" kata komisioner KPU, Hadar N Gumay.

Hadar menuturkan, KPU membuat kebijakan menerima surat rekomendasi, baik dalam bentuk scan dokumen maupun dokumen yang dikirim melalui faksimile, karena ingin mengakomodasi pasangan calon agar tidak terkendala persoalan komunikasi dan transportasi saat mendaftar. Namun, mereka harus segera menyerahkan berkas asli dengan cap basah sesegera mungkin atau paling lambat hingga batas akhir perbaikan berkas pasangan calon.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, menambahkan, pasangan bakal calon Rasiyo-Dhimam Abror masih bisa melengkapi dokumen itu pada masa perbaikan berkas 18-20 Agustus.

Firda menegaskan, persoalan surat rekomendasi untuk Dhimam Abror merupakan masalah teknis yang dapat segera diatasi. Pengawasan

Ketua KPU Kota Denpasar I Gede John Darmawan menuturkan, pihaknya akan membuka kembali pendaftaran pasangan calon peserta pilkada. Hal ini karena hanya tersisa satu pasangan calon peserta Pilkada Kota Denpasar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

Sementara itu, penggiat gerakan masyarakat sipil di Sumatera Barat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Kawal Pilkada akan ikut mengawasi pelaksanaan pilkada di daerah itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan segala tahapan pesta demokrasi pada Desember 2015 di daerah itu berjalan semestinya.

Koordinator koalisi Firdaus mengatakan, fokus pengawasan akan dilakukan pada pemilihan calon gubernur dan di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menggelar pilkada. Kabupaten/kota itu adalah Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Pasaman, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi. (Sumber: Kompas)